

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA SUNGAI BERBARI KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK
TAHUN 2009-2011**

**Oleh
Siti Rahmah
0801165715**

**Dosen pembimbing Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

ABSTRACT

This study would like to see an evaluation of development in the Village River District Berbari Pusako. Pusako Berbari River Village District is one of the villages in Siak has good natural resources, but is not directly proportional to the development of the village. The problem is the background of this research is what are the factors that become barriers to development in the village of River Berbari years 2009-2011?

This research is a qualitative study, the data collection techniques in this study is qualitative. This research uses documentation (observation) and interviews with key informants as the object of information that aims to achieve the goal to get the information in the study. The types of data used in this study is primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with key informants in this study.

Based on the analysis conducted on the study data in order to uncover and answer questions on the study, the results obtained are as follows:

1. Program development in the Village Berbari river does not run properly due to lack of budget for the realization of the program.
2. The addition to the budget constraints, lack of community participation factor River Village Berbari participate in the implementation of development in the village ddalam Berbari River.

Keywords: *Evaluation of Development*

Pendahuluan

Desa Sungai Berbari merupakan salahsatu desa yang berada di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yang memiliki potensi alam yang potensial. Desa Sungai Berbari memiliki Luas 7.289,20 Km2 dan jumlah penduduk 1.535 jiwa (Sumber: Kantor Camat Pusako). Dahulunya Desa Sungai Berbari merupakan wilayah dari Kecamatan Bunga Raya, namun pada tahun 2007 Kecamatan Bunga Raya dipecah menjadi dua yakni Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Pusako yang dipisahkan oleh salahsatu aliran Sungai Siak. Pasca pemekaran tersebut, Desa Sungai Berbari akhirnya dimasukan kedalam wilayah Kecamatan Pusako. Desa Sungai Berbari terdapat banyak lahan kebun kelapa sawit dan jabon baik milik perusahaan maupun perorangan yang memiliki potensi ekonomis yang sangat tinggi, selain itu, Desa Sungai Berbari juga merupakan daerah Hutan Taman Industri (HTI) yang memiliki perusahaan kayu yang seharusnya dapat menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat Desa Sungai Berbari, serta pendapatan desa melalui perizinan perusahaan tersebut. Namun ironisnya Desa Sungai Berbari merupakan salahsatu desa yang memiliki laju pertumbuhan pembangunan yang cukup lambat di dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Siak. Salah satu faktor terhambatnya pembangunan di Desa Sungai Berbari dikarenakan akses masuk ke desa tersebut cukup sulit dicapai karena harus melewati sungai dan harus jalan memutar apabila melewati jalan darat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Desa Sungai Berbari hanya memiliki beberapa infrastruktur umum yang digunakan untuk rutinitas pemerintahan maupun masyarakat.

Berikut data mengenai fasilitas umum yang terdapat di Desa Sungai Berbari Kecamatan Pusako:

Tabel 1.1
Fasilitas Umum di Desa Sungai Berbari

No	Fasilitas Umum	Jumlah
1	Kantor Kepala Desa	1
2	Koperasi	1
3	Polindes	1
4	Posyandu	1
5	Mesjid	1
6	Surau	1
7	Sekolah Dasar	1
8	Lapangan Voly	1

Mayoritas fasilitas umum tersebut berada dalam kondisi yang cukup memperhatikan, dimana membutuhkan perawatan kembali. Oleh karena itu perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan di Desa Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak tahun 2006-2011.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Provinsi Riau yang merupakan salahsatu Desa tertinggal pembangunannya yang ada di Kabupaten Siak. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Hadari Nawawi, 1990). Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya (Suharsimi Arikunto, 1996). Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat.

Data yang digunakan ada dua yaitu, data Primer adalah data hasil dari wawancara bersama key informan yang ikut terlibat didalam program desa/kelurahan mandiri terpadu yang nantinya diharapkan akan memberikan informasi yang akurat mengenai penelitian ini. Dalam penelitian ini data juga di dapatkan dari media (Riau Pos, Tribun, Riau Televisi dan media-media lain yang terdapat baik di Provinsi Riau maupun Nasional). Informan didalam penelitian ini adalah orang yang dianggap terlibat langsung didalam program tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak – pihak yang ada hubungan dengan penelitian ini. Peneliti mengadakan tanya jawab (wawancara berstruktur) kepada informan dan *key informan* guna memperoleh data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana data hasil wawancara yang akan dianalisis secara deskriptif. Melalui teknik ini akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Selanjutnya analisis data akan dilakukan secara induktif, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan.

Hasil Pebahasan

A. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sungai Berbari Kecamatan Pusako

Desa Berbari dahulunya merupakan wilayah dari Kecamatan Bunga Raya yang merupakan salah satu Kecamatan yang cukup cepat pertumbuhan pembangunannya. Namun Desa Sungai Berbari memiliki akses jalan yang cukup sulit apabila ada masyarakat Desa Sungai Berbari yang memiliki kepentingan di Kecamatan karena akses terdekat Desa Sungai Berbari dengan Kecamatan dipisahkan oleh Sungai, apabila ingin menempuh jalur darat maka akan memakan waktu kurang lebih satu setengah jam karena harus memutar melalui jalan lintas. Hal tersebut ternyata juga berbanding lurus dengan historis pembangunan di Desa Sungai Berbari, dimana dikarenakan akses tersebut menyebabkan pembangunan di Kecamatan Bunga Raya tidak merata, daerah seberang sungai salah satunya Desa Sungai Berbari tidak tersentuh didalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut menyebabkan pada tahun 2006 Desa Sungai Berbari bersama desa-desa lainnya yang berada disebatang sungai memilih untuk memekarkan diri dari Kecamatan Bunga Raya dan terbentuklah Kecamatan Pusako, dimana Desa Sungai Berbari juga berada didalam wilayah administrasi Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. Ironisnya ,setelah kurang lebih lima tahun Desa Sungai Berbari menjadi bagian dari Kecamatan Pusako, ternyata tetap saja tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi terhadap pembangunan di Desa Sungai Berbari. Hal ini tentunya menjadi keperhatian dari masyarakat Desa Sungai Berbari yang mana banyak dari aspirasi mereka yang masih tersendat dan menunggu untuk direalisasi. Berikut penuturan dari Kepala Desa Sungai Berbari, Bapak Dulsat didalam petikan wawancara bersamanya, bahwa:

“Pada saat masih berada didalam wilayah Kecamatan Bunga Raya, aspirasi masyarakat Desa Sungai Berbari sangat sulit untuk disampaikan apalagi untuk diterima dan direalisasi. Banyak kendala pada saat itu yang disampaikan oleh pihak kecamatan, dimulai dari minimnya anggaran hingga hal-hal lainnya yang intinya tidak dapat dikabulkan permintaan kita. Adapun permintaan kami seperti pembuatan koperasi, gedung serbaguna, dan lain sebagainya hanya menjadi pepesan kosong saja. Begitu kira-kira yang saya dengar dari Kepala Desa sebelum saya. Saya menjadi Kepala Desa pada saat Desa Sungai Berbari telah menjadi bagian dari Kecamatan Pusako. Namun kondisi yang sama juga terjadi, dimana alasan minimnya anggaran menjadi penyebab utama. Pada masa saya menjadi Kepala Desa Sungai Berbari (2010) APBD untuk Desa Sungai Berbari berjumlah Rp. 324.401.017,- dimana total anggaran untuk pengeluaran pembiayaan saja mencapai Rp. 342.400.962,- , yakni tersisa Rp. 55. Pada tahun 2010 tersebut program pembangunan kita terfokus pada pembangunan sarana dan

prasarana air bersih, *alhamdulillah* sampai hari ini kita sudah tidak ada lagi permasalahan terkait air bersih.”

Semenjak Desa Pusako berada didalam wilayah Kecamatan Pusako, memang masih tidak terdapat perubahan yang signifikan, namun perubahan tetap lebih bagus dari pada pada saat masih menjadi bagian dari Kecamatan Bunga Raya. Berikut penuturan Camat Pusako, Bapak Salman Alfarizi didalam petiukan wawancara berikut megatakan bahwa:

“Desa Sungai Berbari masuk menjadi bagian dari Kecamatan Pusako pada saat pertama kali pemekaran Kecamatan Pusako tahun 2006. Desa Sungai Berbari merupakan Desa yang terletak didaerah strategis yakni di pinggir jalan lintas. Permasalahan kurangnya pembangunan di Desa Sungai Berbari juga dirasakan oleh desa-desa lainnya di Kecamatan Pusako. Sejak dimekarkan dari Kecamatan Bunga Raya, desa-desa diwilayah Kecamatan Pusakon merupakan desa-desa yang cukup tertinggal dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Bunga Raya yang merupakan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Ibukota Kabupaten Siak, sehingga waktu lima tahun ini masih belum cukup untuk benar-benar meningkatkan pembangunan di desa-desa yang berada Kecamatan Pusako.”

B. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Desa Berbari Kecamatan Pusako

Evaluasi pembangunan di Desa Sungai Berbari Kecamatan Pusako juga merupakan suatu kegiatan untuk menilai sampai dimana keberhasilan pembangunan di Desa Sungai Berbari sampai saat ini. Untuk dapat melihat evaluasi tersebut kita dapat melihat dari penyusunan program (penjaringan masalah dan penyusunan program) hingga realisasi dilapangan. Proses penyusunan program pembangunan di Desa Sungai Berbari dimulai dengan penjaringan masalah yakni dengan menyusun Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ataupun Rencana Tahunan Desa (RPTDesa). RPJMDes merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam kurung waktu 5 (lima) tahun. RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yan akan mensuport perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik, maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberikan kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Adapun tujuan RPJMDes adalah sebagai berikut (sumber: Pemerintah Kabupaten Siak):

1. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu lima

tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan desa, kecamatan maupun kabupaten/kota.

2. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
3. Sebagai masukan penyusunan RAPBDes.
4. Disusun/dibuatnya rencana pembangunan jangka lima tahun yang dijabarkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDesa).

Berikut manfaat dari RPJMDes:

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
2. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan desa.
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
5. Dapat mendorong pembangunan swadaya masyarakat.

Didalam penjaringan masalah dilakukan melalui musyawarah dusun/RW yang telah dilaksanakan didalam beberapa pertemuan musyawarah yang dilaksanakan ditempat kediaman masing-masing RW.

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang telah dilakukan, maka masalah dan potensi yang ada di Desa Sungai Berbari. Berikut adalah hasil penjaringan dari tahun 2009 hingga 2011:

Tabel 3.2

**Penjaringan Masalah Pembangunan
Desa Sungai Berbari Tahun 2009**

No	Permasalahan	Keterangan
1	Rehabilitasi kantor desa	Realisasi (tidak selesai)
2	Semenisasi Jalan	Terealisasi (tidak selesai)
3	Rehabilitasi KUD	Tidak terealisasi
4	Pembangunan gedung serba guna	Tidak teralisasi
5	Pembuatan papan nama saran dan prasarana	Terealisasi
6	Rehabilitasi mesjid	Terealisasi
7	Pembuatan gedung pertemuan	Tidak terealisasi

Sumber: Desa Sungai Berbari 2012

Berdasarkan tabel 3.2 terdapat lebih dari 50% program yang telah direncanakan tidak terealisasi. Hal tersebut dikarenakan permasalahan anggaran, sehingga hanya dapat menyelesaikan sebagian besar program pembangunan saja seperti rehabilitasi mesjid, rehabilitasi kantor desa, serta semenisasi jalan. Itu pun dua program terakhir yang disebutkan tidak terealisasi sampai akhir. Berikut penuturan mantan Kepala Desa Sungai

Berbari (Tokoh Masyarakat Desa Sungai Berbari), Bapak Abdul Sad mengatakan bahwa:

“Permasalahan yang paling signifikan adalah permasalahan anggaran, bahkan memang itulah satu-satunya permasalahan klasik yang memang sulit untuk dicarikan jalan keluarnya. Pada saat tahun terakhir saya menjadi Kepala Desa tersebut (2009), kita telah berupaya untuk meminta bantuan kepada perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Desa Berbari, namun pada saat itu mereka mengatakan akan membantu pada tahun selanjutnya”.

Berikut penjarangan masalah pembangunan Desa Sungai Berbari tahun 2010 serta realisasinya:

Tabel 3.3
Penjarangan Masalah Pembangunan
Desa Sungai Berbari Tahun 2010

No	Permasalahan	Keterangan
1	Rehabilitasi KUD	Tidak terealisasi
2	Semenisasi Jalan	Terealisasi
3	Pembangunan gedung serba guna	Tidak terealisasi
4	Pembangunan air bersih	Terealisasi
5	Pembangunan jembatan	Tidak terealisasi
6	Pembuatan gorong-gorong	Tidak terealisasi
7	Pembuatan gedung pertemuan	Tidak terealisasi
8	Rehabilitasi kantor desa	Realisasi (tidak selesai)

Sumber: Desa Sungai Berbari 2012

Pada tahun 2010, sama seperti tahun 2009, lebih dari 50% program pembangunan yang tidak terealisasi. Pada tahun 2010, APBD Desa Sungai Berbari mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni pada tahun 2009 berjumlah Rp. 393.624.966,- sedangkan untuk tahun 2010 hanya berjumlah Rp. 342.401.017. Agar tidak mengalami defisit anggaran, maka pemerintah desa dengan terpaksa harus membatalkan beberapa program pembangunan yang telah direncanakan.

Berikut penuturan Kepala Desa Sungai Berbari, Bapak Dulsat didalam petikan wawancara bersamanya:

“Tahun 2010 adalah tahun pertama saya memimpin Desa Sungai Berbari, sehingga masih perlu beberapa adaptasi, khususnya permasalahan penyusunan dan relaisasi anggaran. Pada tahun 2010 APBD Desa Sungai Berbari juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan APBD

Kabupaten Siak juga mengalami penurunan. Dampak dari hal tersebut mengharuskan kita harus bijak didalam penyusunannya”.

Mantan Kepala Desa Sungai Berbari (Tokoh Masyarakat Desa Sungai Berbari), Bapak Abdul Sad mengatakan bahwa:

“Seharusnya untuk APBD Desa Sungai Berbari tahun 2010 harus bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, sayangnya realisasi pembangunan juga masih sangat minim. Hal tersebut dikarenakan permasalahan klasik yaitu anggaran. Seharusnya pemerintah desa didalam hal ini harus lebih kreatif didalam mencari sumber pendanaan dengan memanfaatkan kehadiran perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Desa Sungai Berbari”.

Berikut data mengenai penjarangan masalah pembangunan Desa Sungai Berbari Kecamatan Pusako tahun 2011:

Tabel 3.3
Penjarangan Masalah Pembangunan
Desa Sungai Berbari Tahun 2011

No	Permasalahan	Keterangan
1	Rehabilitasi KUD	Tidak terealisasi
2	Pembangunan irigasi	Terealisasi
3	Rehabilitasi Kantor Desa	Terealisasi
3	Pembangunan gedung serba guna	Tidak terealisasi
4	Pembangunan jembatan	Tidak terealisasi
5	Pembangunan gorong-gorong	Terealisasi

Sumber: Desa Sungai Berbari 2012

Pada tahun 2011 APBD Desa Sungai Berbari kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni menjadi Rp. 320.838.800,- yang sebelumnya pada tahun 2010 berjumlah Rp. 342.401.017,-. Tahun 2011 juga sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana lebih dari 50% program pembangunan yang tidak terealisasi. Dua dari tiga program yang terealisasi adalah program tahun sebelumnya, bahkan program rehabilitasi kantor desa merupakan program yang telah diproyeksikan mulai dari tahun 2009.

Pada tahun 2011 juga menjadi hal baru didalam pemanfaatan APBD Desa Sungai Berbari Kecamatan Pusako, dimana terdapat defisit anggaran mencapai Rp. 6.911.182,-. Hal ini merupakan suatu tindakan berani dari Pemerintahan Desa Sungai Berbari mengingat selama ini APBD yang ada saja selalu tidak mencukupi untuk realisasi program yang ada. Berikut penuturan dari Ilham (Ketua Karang Taruna Desa Sungai Berbari):

“Keputusan dari Kepala Desa memang cukup mengejutkan karena berani mengambil resiko, sehingga akhirnya anggaran desa menjadi defisit sampai diatas lima juta rupiah. Memang

angka lima juta tidak terlalu besar, namun hal tersebut menunjukkan kurang bijaknya pemerintah desa didalam penyusunan dan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menjadi perseden buruk bagi pemerintahan desa kedepannya, karena harus mencari kembali anggaran untuk menutupi defisit tersebut”.

Irwan yang merupakan Ketua RT 01 RW 02 di Desa Sungai Berbari mengatakan bahwa:

“Memang berat kebijakan yang diambil mengingat anggaran kita yang sangat minim, tetapi harusnya dalam hal ini Kepala Desa harus lebih bijak lagi didalam mengeluarkan kebijakan, khususnya kebijakan anggaran.”

Menanggapi pernyataan dan kondisi tersebut, Bapak Dulsat (Kepala Desa Sungai Berbari) mengatakan bahwa semua kebijakan yang diambilnya adalah demi kemajuan Desa Sungai Berbari, memang didalam kebijakan tersebut mengandung resiko, namun memang itulah yang harus dihadapi didalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan, tidak ada kebijakan yang tidak memiliki resiko. Ditambahkan lagi oleh beliau bahwa, pada tahun 2011, lagi-lagi APBD Desa Sungai Berbari mengalami penurunan bahkan lebih dari dua puluh juta rupiah, sedangkan banyak program pembangunan yang harus direalisasi, khususnya beberapa program yang memang mau tidak mau harus direalisasikan, seperti pembangunan irigasi dan gorong-gorong yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan untuk rehabilitasi kantor desa memang sudah menjadi keharusan untuk dijalankan karena memang merupakan dana hibah dari Kabupaten yang mana tidak bisa dialihkan kepada program pembangunan lainnya.

C. Hambatan-hambatan Didalam Pelaksanaan

1. Anggaran

Anggaran merupakan salahsatu tolak ukur kesuksesan sebuah program ataupun kebijakan pemeintah yang terkhususkan membutuhkan anggaran demi mensukseskan program tersebut. Peran anggaran disini sangat signifikan mengingat apabila tidak ada anggaran, maka program tersebut tidak akan dapat berjalan dengan optimal, bahkan terkadang berhenti ditempat karena terhambat dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program tersebut.

Demi tetap terjaganya peran anggaran didalam suatu program, maka seluruh pihak-pihak terkait dalam penyusunan anggaran harus bekerjasama dengn baik dalam hal penyusunan anggaran, agar nantinya dapat menyepakati sebuah anggaran didalam RAPBD dengan bijak, efektif dan efisien berdasarkan pengoptimalan program yang diyakini untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara umum. Pihak-pihak terkait disini adalah pemerintah desa bersama dengan perangkat desa lainnya.

APBD Desa Sungai Berbari sejak tahun 2009 selalu mengalami penurunan hingga APBD tahun 2011. Berikut APBD Desa Sungai Berbari tahun 2009-2011:

Tabel 3.1
APBD Desa Sungai Berbari Tahun 2009-2011

No	Tahun Anggaran	Anggaran Pendapatan Desa (Rp)	Anggaran Belanja Desa (Rp)	Surplus/Defisit (Rp)
1	2009	393.624.966,-	393.490.169,-	134.797,-
2	2010	342.401.017,-	342.400.962,-	55,-
3	2011	320.838.800,-	327.759.184,-	(6.910.384)

Sumber: Desa Sungai Berbari 2012

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut, dengan jelas memaparkan bahwa setiap tahunnya (2009-2011) APBD Desa Sungai Berbari mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2011 mengalami defisit anggaran mencapai Rp. 6.910.384,-. Bapak Dulsat (Kepala Desa Sungai Berbari) mengatakan didalam wawancara bersamanya, bahwa salah satu penyebab sulitnya pembangunan di Desa Sungai Berbari dikarenakan sulitnya mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan tersebut. Sudah beberapa kali Desa Sungai Berbari melalui pemerintah desa mengajukan anggaran untuk pembangunan di Desa tersebut, namun permasalahan klasik juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten, yakni permasalahan anggaran yang memang minim.

Ditambahkan juga oleh Sekretaris Desa Sungai Berbari, Ibu Alinda Nurhayati, bahwa Selama ini kita juga berupaya untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Siak. *Alhamdulillah* Desa Sungai Berbari memang mendapatkan dana hibah, namun tetap saja tidak bisa menutupi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan yang telah direncanakan.

Penuturan lain disampaikan oleh mantan Kepala Desa Sungai Berbari (Tokoh Masyarakat Desa Sungai Berbari), Bapak Abdul Sad bahwa salah satu alasan yang menyebabkan APBD Desa Sungai Berbari selalu menurun di setiap tahunnya adalah dikarenakan perangkat ddesa saat ini yang kurang berupaya untuk mendapatkan dan merealisasikan anggar yang telah direncanakan. Perangkat Desa saat ini kurang memiliki *power* yang kuat untuk bisa optimal didalam memperjuangkan anggaran. Desa Sungai Berbari memiliki beberapa perusahaan swasta yang mendapatkan banyak keuntungan dari alam Desa Sungai Berbari, harusnya pemerintah desa dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bapak Abdul Sad merupakan Kepala Desa Sungai Berbari yang berakhir masa jabatannya pada pertengahan tahun 2009. Menurut data yang didapatkan pada saat pergantian Kepala Desa pada tahun 2009, APBD Desa Sungai Berbari ditahun-tahun selanjutnya mengalami kemerosotan. Namun menjawab pernyataan Bapak Abdul Sad tersebut Bapak Agusriandi, Ketua

Badan Permusyawaratan Desa Sungai Berbari mengatakan bahwa penurunan APBD Desa Sungai Berbari dikarenakan memang penurunan APBD Kabupaten Siak. Hal tersebut akhirnya berdampak kepada APBD desa-desa lainnya. Faktor lainnya adalah ditutupnya beberapa perusahaan swasta yang ada di Desa Sungai Berbari menyebabkan pendapatan asli desa mengalami penurunan. Selama ini pemerintah desa bersama dengan BPD Sungai Berbari telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan Desa Sungai Berbari, namun memang selalu terkendala pada anggaran. Faktor lainnya lagi yang menyebabkan APBD Desa Sungai Berbari menurun setiap tahunnya karena, Pemerintah Kabupaten Siak ingin melakukan pemerataan pembangunan di desa-desa lainnya di Kabupaten Siak. Apabila dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Siak, Desa Sungai Berbari sudah dapat dikatakan cukup baik pembangunannya, karena sebenarnya masih sangat banyak desa-desa lainnya di Kabupaten Siak yang pembangunannya masih lebih rendah dari pada Desa Sungai Berbari. Bahkan untuk tataran lingkup Kecamatan Pusako Desa Sungai Berbari merupakan salahsatu Desa yang dapat dikatakan maju pembangunannya dibandingkan desa lainnya. Walaupun masih sangat rendah dibandingkan desa lainnya yang berada dekat dengan Ibukota Kabupaten.

2. Partisipasi Masyarakat

Kramer (Ndraha, 1991) mengatakan bahwa partisipasi akan mengandung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan. Partisipasi mengarah pada pengembangan program penduduk yang ditempatkan sebagai konsumen utama dari program-program pembangunan infrastruktur fisik daerah. Kepentingan-kepentingan, dan saran-saran mereka harus didengar oleh mereka yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan memberikan pelayanan-pelayanan pembangunan daerah. Partisipasi diadakan dalam rangka nilai keadilan sosial, dan dalam rangka tersedianya kelonggaran memperoleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi merupakan syarat mutlak dari demokrasi. Agar dapat terlaksananya partisipasi yang diharapkan (**Fadillah, 2009 : 124**), maka terlebih dahulu ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, yakni :

- a. Adanya kesadaran politik yang cukup tinggi bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat.
- b. Terciptanya suatu tradisi partisipasi dalam setiap proses pembangunan.
- c. Tersedianya ruang serta jaminan bagi pelaksanaan dan pengembangan partisipasi itu sendiri.

Masyarakat Desa Beringin Makmur memiliki partisipasi yang tinggi dalam pembangunan desa. Seperti yang dikatakan oleh **Conyers (Ndraha;1991)**, bahwa ada dua faktor yang yang mempengaruhi terhadap berhasil atau gagalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yakni:

1. Hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan berpartisipasi atau kemauan sendiri atau dengan atusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir.
2. Masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan tidak menarik minat mereka atau yang tidak mempunyai pengaruh langsung dapat mereka rasakan.

Desa Sungai Berbari memiliki penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani (22,93%). Kebanyakan dari mereka terlalu sibuk dengan mata pencaharian mereka tersebut sehingga tidak terlalu memikirkan pembangunan yang terjadi di Desa Sungai Berbari, Berikut petikan wawancara bersama dengan Bapak Sumarno (warga Desa Sungai Berbari):

“Saya kurang ngerti mbak, yang saya tahu desa kita punya lapangan, mesjid, posyandu, koprasi. Saya pikir itu sudah cukup. Untuk olahraga ada lapangan, untuk beribadah ada mesjid. O iya ada suarau juga untuk beribadah, kalau mw berobat ada polindes. Tapi kalau ditanya apa lagi yang dibutuhkan sama masyarakat desa, ya banyak mbak. Namun saya bingung juga kalau ditanya apa saja. Selama ini dalam pembangunan memang pemerintah desa tidak pernah melibatkan masyarakat. Kami tahunya pada saat sudah jadi saja”.

Berikut Penuturan dari Bapak Jumino (warga Desa Sungai Berbari):

“Saya dari lahir memang sudah tinggal disini mbak, orang tua saya yang memang pendatang dari Jawa. Smemenjak saya kecil samapai smapai sekarang telah banyak perubahan di Desa Sungai Berbari, salahsatunya banyak hutan yang habis. Kalau perubahan dari pembangunannya masih itu-itu saja, ya standar seperti desa-desa lainnya juga mbak. Saya jarang ikut terlibat didalam pembangunan desa, paling Cuma ikut gotong royong dimesjid sebulan sekali. Masyarakat disini memang mayoritasnya bekerja sebagai petani, jadi kebanyakan dari kami tidak terlalu mengetahui pembangunan di desa kami”.

Berdasarkan peturan wawancara tersebut tampak sekali kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap pembangunan di Desa Sungai Berbari. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih sibuk dengan kesibukan mereka sehari-hari yakni bercocok tanam bagi petani. Selain itu pemerintah Desa Sungai Berbari juga sering kali tidak melibatkan mereka didalam merumuskan hingga pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Program pembangunan di Desa Sungai Berbari tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan kurangnya anggaran untuk realisasi program tersebut.
2. Adapun selain anggaran yang menjadi kendala, faktor kurangnya partisipasi masyarakat Desa Sungai Berbari didalam ikut serta ddalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Berbari.

1.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sungai Berbari Kecamatan Pusako harus mencari alternatif anggaran untuk dapat merealisasikan program pembangunan di Desa Sungai Berbari salahsatunya adalah dengan memanfaatkan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Desa Sungai Berbari.
2. Pemerintah Desa Sungai Berbari Kecamatan Pusako melalui Kepala Desa harus bisa menjadi katalisator (merangsang) partisipasi masyarakat untuk turut aktif didalam pelaksanaan pembangunan Desa Sungai Berbari.

Daftar Pustaka

Buku :

- Bungin, M. Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: KENCANA
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dwipayana, Ari. Eko, Sutoro. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE. Yogyakarta.
- Fadillah, Putra. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi Dalam Pembangunan. Program Sekolah Demokrasi*. Malang.
- Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press: Jogjakarta.
- HAW. Widjaja. 2003. *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang Asli, bulat dan utuh*. Rajawali Pers. Jakarta.
- HAW. Widjaja. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Hessel, Nogi. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lapera
- Hosio. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Jakarta : Laksbang
- Irfan, Muhammad. 1991. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Lexi J Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mulyana, Dedi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Proses Pembangunan Nasional*. Gunung Agung. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Soekarto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Syaikuni.2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Citra Utama

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju

Jurnal:

Pusat kajian Otonomi Daerah, “ Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Periode 1999-2003” Lembaga Administrasi Negara 2005.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa